

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI
TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 469/Pid.Sus/2015/PN.Ban)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

A. MUHAMMAD NUZUL IDRIS

NIM : 10500113166

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

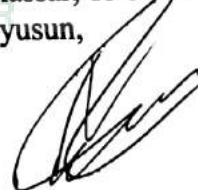
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
Nim : 10500113166
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 17 Februari 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jalan Toddopuli 19 No.202
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak
Pidana pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor : 469/Pid.
Sus/2015/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Maret 2018
Penyusun,



A. Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor : 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)"**, yang disusun oleh saudara **A. Muhammad Nuzul Idris**, NIM: **10500113166**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 15 Maret 2018
27 Jumadil Akhirah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqasyah II	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta tidak lupa salam serta shalawat saya haturkan kepada Baginda Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua Ayahandaku H.A. Idris Tumpa., S.H dan Hj. Cendrawati. Kepada kakak ku yang senantiasa riang, kakek, nenek, om, tante, saudara sepupuku yang senantiasa mendorong serta memotivasi penulis, keluarga besar dan kepada seluruh orang yang telah memberikan segenap dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr.H. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ashabul Kahfi, S.Ag,. M.H selaku Pembimbing II, yang telah senantiasa sabar memberikan bimbingan, saran serta kritik kepada penulis.
4. Ibu Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Para Dosen dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali ilmu.

5. Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu, meluangkan waktu dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian
6. Teman-teman Seperjuangan Kelas Ilmu Hukum D
7. Teman-teman di kepengurusan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Priode 2017-2018 tak lupa juga kepada kakanda,adinda, dan teman seperjuangan di organisasi Serikat Mahasiswa Penggiat Konsitusi dan Hukum yang senentiasa mendukung Penulis Untuk menyelesaikan Perkuliahan nya
8. Teman-teman Kkn kecamatan Tellulimpoe khususnya di Posko kelurahan Manannanti
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini telah mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah datang dalam hidup penulis, yang mengilhami, menyentuh dan menerangi melalui kehadirannya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini kedepan.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Makassar, 13 Maret 2018

Penulis

ABSTRAK

NAMA : A. Muhammad Nuzul idris

NIM : (10500113166)

JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Skripsi ini menjelaskan Tinjauan Yuridis tentang penjatuhan pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Eksistensi Pidana mati di Indonesia ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan Narkotika Gol. 1 dalam Putusan di Pengadilan Negeri Makassar ? Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa metodologi penelitian kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri makassar terhadap Tindak Pidana pengedaran Narkotika pada perkara Putusan Nomor : 469/PID.SUS/2015/PN.MKS telah sesuai dan memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I. 2) Penjatuhan pidana mati pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa ini yakni peredaran narkotika yang sangat amat mengkhawatirkan dan indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan Pidana mati yan termuat dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 sudah di anggap sangat tepat dikarenakan untuk memberikan efek jera di tujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang masih menjadi pelaku pengedar narkotika agar segera berhenti karena sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedar narkotika ialah pidana mati. Implikasi dari penelitian ini yaitu penerapan hukumam Mati tetap harus diterapkan untuk ketentuan pidana yang sudah mengancam kepentingan umat manusia. Dalam hal ini pidana narkotika, Indonesia yang saat ini benar-benar dalam keadaan Darurat Narkotika, agar dalam teori tujuan Pemidanaan dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana (<i>Straff bar Feit</i>).....	12
1. Pengertian Tindak Pidana (Straf baar Feit)	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Pembagian Unsur Tindak Pidana	17
4. Jenis-jenis Tindak pidana	19
B. Narkotika.....	27
1. Definisi Narkotika	27
2. Jenis-jenis Narkotika	31
3. Tindak Pidana Narkotika	39
C. Pemidanaan	42
1. Pengertian Pemidanaan	42
2. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan	44
3. Jenis-jenis Pidana Menurut UU No 1 tahun 1946 Tentang Praturan Hukum pidana.....	48
BAB III – METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian dan Lokasi penelitian	54
1. Jenis penelitian	54

2. Lokasi Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Instrumen Penelitian.....	56
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
G. Pengujian Keabsahan Data.....	57
BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Eksistensi Pidana Mati di Inoneisa ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia	59
1. Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia	59
2. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia	61
3. Pro dan Kontra Pidana Mati	62
4. Pidana Mati dalam perspektif HAM.....	66
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kepemilikan Narkoba Gol. 1 dalam Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.	68
1. Posisin Kasus.....	69
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	70
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	76
4. Amar Putusan	77
5. Pertimbangan Hukum Hakim	78
6. Analisis Penulis	87
BAB V – PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	95
B. Implikasi Penelitian.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berstatus Negara hukum (*rechtaat*). bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian, juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan tidak diskriminatif, serta tidak sewenang-wenang.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembang tindak kriminal yang dapat membawa dampak merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karena itu Indonesia yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi sebagai saksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, sehingga eksistensi Negara bisa terwujud.

Masalah yang sering ditemukan dalam masyarakat yang berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana pada kenyataan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku manusia yang semakin kompleks dan bahkan multi kompleks merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan ini bisa-

bisa berpengaruh kearah positif maupun negatif yang arahnya positif dinilai dengan sesuai kaidah ataupun norma yang berlaku sedang arah negatifnya bertentangan dengan norma menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia yang dinilai suatu pengangguran bahkan sebagai suatu kejahatan.

Pandangan moderinitas yang menghendaki adanya pembongkaran tata nilai atau norma dalam masyarakat, justru menjadi variabel pemicu lainnya, berbagai bentuk tindak pidana dalam masyarakat. Tentu saja ini menjadi relevan karena proses penetrasi budaya luar terhadap perubahan tata nilai maupun norma dalam masyarakat. Perilaku negatif ini, tentu saja lahir karena desakan kultur yang menghendaki demikian, terutama kehendak untuk melakukan tindak pidana di dalam masyarakat.

Menurut Parasian Simanungkalit bahwa penyalagunaan narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan transnasional (*transnasional crime*) karena efek penyalagunaan narkoba bukan saja menghancurkan diri pengguna narkoba tetapi juga dapat merusak struktur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perspektif yang sama dikatakan Lickona bahwa salah satu ciri hancurnya suatu negara yaitu adanya perilaku merusak diri sendiri seperti penyalagunaan narkoba yang semakin meningkat di suatu negara.¹

¹Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari khamar yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadist, ketentuan mengenai khamar dapat diketahui dalam firman Allah swt QS Al-Maidah/5:90-91

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) Ayat diatas berbicara mengenai haramnya *khamar*. Yang dimaksud *Khamar*.² dalam Islam boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama

Bahwa mengkonsumsi narkoba haram hukumnya, keharaman narkoba di qiyaskan dengan keharaman minum khamar. Unsur-unsur merusak yang terdapat dalam khamar terdapat pula dalam narkoba. Karena adanya kesamaan *illat* inilah yang menjadikan narkoba haram hukumnya.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), h. 123.

Qiyas, dengan mengambil persamaan *illat* hukum dari khamar yang sudah jelas hukumnya dengan narkoba yang merupakan masalah kontemporer yang tidak disebutkan hukumnya dalam al-Qur'an.³

Narkoba memang tidak dijelaskan secara kongkrit dalam al-Qur'an, namun narkoba termasuk dari khamar karna narkoba dan khamar sama-sama memiliki dampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan atau disalahgunakan, mengkonsumsi narkoba dan khamar dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, rasa sakit, serta dapat mengakibatkan ketergantungan, pengguna narkoba secara terus menerus juga berimbas kepada menurunnya sistem imunitas tubuh, overdosis, bahkan dapat menyebabkan si pengguna sampai pada titik kematian.

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda dan penerapannya dilakukan secara kumulatif. Agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati, polemik ini misalnya mengatakan bahwa pidana mati tersebut

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Cet. 1; Jakarta: Lentera hati, 2002), h.326

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Namun dalam praktiknya, undang-undang tentang narkoba belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalaguna narkoba cenderung mengalami peningkatan danyang lebih memprihatinkan yakni semakin banyaknya remaja atau kaum muda yang terjerat menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari BNN Jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.⁴

Dalam kurung waktu 12 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sekitar 15 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati.⁵ Pro-kontra seputar eksistensi hukuman mati bagi pelaku narkoba menjadi perbincangan cukup serius di kalangan ahli hukum, kriminologi, tokoh agama dan aktifis HAM. Ditengah kecendrungan dan tren global akan penangguhan (*moratorium*) hukuman mati, praktek tersebut justru semakin lazim di terapkan di Indonesia.⁶ Meski sering kali menimbulkan kontroversi dan pertentangan, penjatuhan hukuman mati di Indonesia semakin eksis dan di benarkan secara yuridis formal.

⁴ Kompas, "Jumlah Napi Narkotika Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera", *Situs Resmi Kompas*. 11 May 2016. <http://nasional.kompas.com> (di Akses 15 Agustus 2017).

⁵ Bisnis24. "Ini Daftar Terpidana Mati Di Indonesia Yang Sudah Dieksekusi" *Situs Resmi Kabar24*. 21 Januari 2015 <http://kabar24.bisnis.com> (15 Agustus 2017).

⁶ Mulya Lubis dkk, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Cet, 1; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 2-4.

Bagi yang setuju, hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang masih dibutuhkan untuk memberi efek cegah dan metode untuk mengurangi kejahatan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menegaskan, eksekusi mati perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan demi mengurangi kejahatan.⁷ sedangkan bagi kalangan yang menolak menganggap bahwa hukuman mati merupakan pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar hak asasi manusia, karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun oleh individu apalagi oleh negara dalam keadaan darurat apapun.

Alih-alih menemukan titik temu atau kesepakatan, perdebatan seputar teori pemidanaan, apalagi kasus hukuman mati justru semakin meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumen dan statemennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrim. Disatu sisi muncul kelompok ekstrim yang semakin keras menentang hukuman mati, sementara disisi yang lain muncul pula kelompok ekstrim yang kian solid mempertahankan hukuman mati. Dalam konteks Indonesia kelompok ekstrim pertama terwakili dalam kalangan aktifis HAM dan ahli hukum, sedangkan kelompok ekstrim kedua di isi oleh penguasa (pejabat negara), kelompok agama, dan sebagian lembaga publik yang menyakini hukuman mati sebagai solusi alternatif penegakan hukum di Indonesia.⁸

Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karna terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa di

⁷ Kompas.“Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum” *Situs Resmi Kompas*, 26 Juli 2016 <http://nasional.kompas.com>. (15 Agustus 2017).

⁸ Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indonesia”. *Situs Resmi Kontras*. <http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper-Hukuman-Mati-di-Indonesia.pdf> (1 Agustus 2016)

batasi, akan tetapi justru para pelaku melanggar hak hasasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Pidana mati telah di atur Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁹

Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tapi dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Dalam hal penjatuhan pidana mati, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim yang secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga.

⁹<http://www.hukumpedia.com/dianahijri/keputusan-penerapan-hukuman-mati-di-indonesia>

Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim.¹⁰

Penjatuan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dimuka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**

B. Rumusan masalah

Berkaitan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam Perspektif Hak asasi Manusia ?

¹⁰ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.51

2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan Narkoba Gol I (Putusan Nomor: 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.)

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan penelitian mengenai tinjauan yuridis penjatuhan pidana mati atas pengedaran Narkotika. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis yang pertama bagaimanakah eksistensi pidana mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia dan yang kedua adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan narkoba golongan 1.

D. Tujuan Penelitian

Sebagai salah satu karya ilmiah maka peneliti tentunya mempunyai tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan Narkoba Gol. I dalam Putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama bagi

yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penanganan perkara tindak pidana narkotika

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum pidana pada khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana pengedaran narkotika
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pengedaran narkotika dengan penelitian ini

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature – literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa literatur sebagai acuan dasar antara lain:

1. Kancil C.S.T. dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* dalam buku ini membahas mengenai pengertian pengantar ilmu hukum, asas – asas hukum, system hukum dan teori – teori ilmu hukum serta membahas beberapa hal penting mengenai perkembangan dunia hukum.
2. Soedjono D, dalam bukunya *Segi Hukum tentang Narkotika Indonesia* dalam buku ini membahas mengenai penyalagunaan Narkotika di Indonesia dan membahas jenis – jenis Narkotika dan faktor – faktor dan

penyebab efek penyalagunaan Narkotika serta membahas ketentuan hukum terkait Narkotika baik dalam hal landasan hukum, dan sanksi – sanksi pidananya.

3. Wahyuni ismail, dalam bukunya *Remaja dan Penyalagunaan Narkoba* dalam buku ini membahas mengenai penyalagunaan narkoba yang sangat mudah dan leluasa masuk ke dalam kehidupan remaja Indonesia, hal – hal mengenai narkoba, jenis – jenisnya, faktor – faktor penyebab dan efek dari penyalagunaan narkoba serta membahas mengenai ketentuan hukum baik dalam hallandasan hukum, dan sanksi pidananya.
4. Taufik Makaro dkk, dalam bukunya *Tindak Pidana Narkotika* menjelaskan tentang kejahatan/ tindak pidana narkoika jenis dan golongan serta praturan perundang-undangannya, yang dilengkapi dengan contoh kasus
5. Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)* yang menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, serta proses beracara dalam hukum pidana. Buku ini menjelaskan tentang hukum acara pidana yang telah dikodifikasi dalam KUHAP sehingga sangat membantu dalam menguraikan proses demi proses dalam alur pembuktian hukum acara pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana (*Straff bar Feit*)

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memikirkan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²

¹ E.Y. Kanter, S.H., et.al, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Alumni AHM-PTHM, 1982), h. 205.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2005), h. 97.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:³

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah:⁴

Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap gangguan hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *normovertreding* (*verstoring der rechtsorde*), *waaran de overtreder schuld heft an waarvan de bestaaffing diennstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Definisi *strafbaar feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998), h. 75.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, (Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 1997), h.182.

undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Dari uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.225.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h.59.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu ialah telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana. Juga merupakan alasan bagi Negara di dalam menggunakan haknya untuk memeberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, untuk mengadili maupun menjatuhkan tindak pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁷

- a. Subjek
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dai suatu tindakan;

⁷ Kanter E.Y dan S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika,2002), h.211

- d. Suatu tindakanyang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan terhadap pelanggranya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan kadaan (unsur objektif lainnya)

Sedangkan ahli hukum simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸

- a. Bertentangan dengan hukum;
- b. Dilakukan dengan orang yang bersalah; dan
- c. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatanya.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut;

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu di ancam dengan pidana.⁹

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

⁸ Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Rangkang,2012), h.46

⁹ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h.290

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur–unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal 362

KUHP, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP tersebut diatas maka, orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian.

Tetapi, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

3. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang

dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merenanakan terlebih dahulu atau *voorbedachtteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;

¹⁰ P.A.F Laminantang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h.193-194.

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana.

dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

- a. Delik kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtradigen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan ini sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun

belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini dering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik setelah dirumuskan dalam undang – undang.

b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materiil (*Materieel Delict*)

Delik formil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan ini mencocoki rumuan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Delik materiil (*materieel delict*) dilarang yang ditimbulkan suatu percobaan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang akan ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacth Delicten*) dan Delik Umum (*Gowane Delicten*)

Delik aduan (*Klacth Delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Delik aduan absolute (*absolute klachtdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan.
2. Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.

Delik umum (*gewonedelicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.

- e. Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propria*)

Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicten* atau *algamene delicten*.

Delik khusus (*delicta propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

- f. Delik *commisionis*, *ommisionis*, dan *commisionis per ommisionem commisa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*.

Delik *Ommisinis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*.

Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan akibat.

Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik politik murni dan delik politik campuran

Menurut komfrensi hukum pidana di koppenhagen 1933 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.¹¹ Dalam KUHP delik-delik yang di kualifikasi di berbagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I buku II. Disamping itu delik-delik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme.

Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik di bedkan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.102

1. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan kepentingan politik.
2. Delik politik ampuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

i. Delik biasa dan elik delik berkualisifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidanya.

Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memberatkan atau mengurangi ancaman pidananya.

5. Bentuk-bentuk penyertaan

a. Pengertian penyertaan (*deelneming*)

Salah satu subjek hukum pidana adalah manusia dan kualifikasi tertentu, yaitu ia mempunyai kewajiban atau tanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, suatu tindak pidana seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tersebut *deelneming* atau keikutsertaan. Akan tetapi apabila seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana disebut *allen dader*.

Deelneming merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Kedudukan masing-masing orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, sehingga berat ringannya tanggung

jawab pidananya juga tidak sama. Dalam perkara *deelneming* mungkin hanya satu orang atau lebih yang wajib dibebani bertanggung jawab pidana secara penuh, sedangkan lain orang hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

b. Orang yang melakukan (*dader*)

Dader dalam bahas belanda berarti pembuat. Kata *dader* berasal dari *daad* yang berarti membuat. Sedangkan dalam bahasa inggris pelaku disebut *doer*. Menurut Laden Marpung yang dimaksud dengan pelaku adalah yang memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu :¹²

1. Delik formil, pelakunya adalah orang-orang yang memenuhi perumuan delik dalam undang-undang.
2. Delik mateetiil, pelakunya yaitu orang membutuhkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana dirumuskan.

c. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegeri*)

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berbuat atau berkehendak untuk melakukan suatu delik namun tidak melakukan suatu delik namun tidak melakukan sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*. Orang yang disuruh melakukan

¹² Laden Marpung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.78

perbuatan tersebut disebut *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurispendisi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 desember 1956.¹³

d. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Orang yang turut melakukan atau yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi dua unsur berikut :

1. Harus ada kerja sama
2. Harus ada kesadaran kerja sama

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu delik atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah satu seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Putusan tanggal 26 juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 berpendapat bahwa:

Perbuatan terdakwa mengancam dengan pistol tidak memenuhi memenuhi semua unsur 339 KUHP. Terdakwa ke-I yang memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban. Oleh karena itu Terdakwa ke-II, kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*medeplagen*), sedangkan pembuat riilnya adalah terdakwaanya.

e. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam pasal 55 Ayat (1) sub dua KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang

¹³ Yurispudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956

berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya. Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah *mededader* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* adalah pada *mededader* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.¹⁴

Menurut Laden Mapung unsur-unsur yang ada dalam *uitlokker* yaitu:¹⁵

1. Kesengajaan pembujuk ditunjukkn kepada dilakukannya delik atau tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk.
2. Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, menyakab gunakan kesalahan, kekerasan, acaman, tipu daya, dan kesempatan, iktiar atau ketenaran.
3. Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu.
4. Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau sretidak-tidaknya percobaan atau *poging*
- f. Membantu (*Medeplichtgheid*)

Membantu atau *medeplichtgheid* diatur dalam pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁴ Ladeb Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.24

¹⁵ Ladeb Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* , h.85

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Kemudian dalam Pasal 57 KUHP, mengatur bahwa untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana. Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini melakukan dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.¹⁶

B. NARKOTIKA

1. Defenisi Narkotika

Narkotika berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiuan. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1995), h.76

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh terutama pada tubuh si pemakai, yaitu :¹⁷

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan perangsang sex)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka

¹⁷ Soedjono D. “*Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*”, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1967), h.14

waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut sudarto bahwa:

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “ Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹⁸

Sedangkan, Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika.

Narkotika adalah zat-zat obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*Morphine, codein, methadone*)¹⁹

Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “ Narcotic Identification Manual” sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Muksin Menjelaskan²⁰

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cacin. Dan termasuk juga narkotika sintesi yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.

Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No 287 jo. No 536 yang telah diubah dan ditambahkan, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah “ bahan-bahan yang terutama

¹⁸ Djoko Prakoso dkk “ *Kejahatan- kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*” (Jakarta: Bina Aksara,1987), h.480

¹⁹ Djoko Prakoso dkk “ *Kejahatan- kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, h. 481

²⁰ Djoko Prakoso dkk “ *Kejahatan- kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*” , h. 482

mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila secara terus-meneruskan dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O staatblad 1972 No. 278 jo. No 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, *cocainer* kasar, *codeine* hanya dapat diperoleh dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu :²¹

- a. Apoteker dan ahli kedokteran
- b. Dokter Hewan
- c. Pengusaha Pabrik Obat

Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat – zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula

²¹ Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1976), h.150

disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Jenis-jenis narkoba dalam Undang-Undang Narkoba pada bab III Ruang Lingkup pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkoba dogolongkan menjadi:

- a. Narkoba golongan I
- b. Narkoba golongan II,
- c. Narkoba III

Narkoba yang terkenal di indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoteis*” yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Jenis-jenis narkoba yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif, terutama kepada kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

- a. Opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina disebut “*Japien*”. Banyak ditemukan di negara-negara , seperti Turki, Irak, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat

dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotic* dan *tranzlizer*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimoatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan *papaver somniferium* ini di antara lain sebagai berikut:

1. Termasuk golongan tumbuhan semak(perdu)
2. Warna daun hijau tua (keperak-perakan)
3. Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm
4. Permukaan daun tidak rata melainkan melekuk-lekuk
5. Buahnya berbentuk seperti tabuh gong
6. Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkcn candu masak merupakan hasil olahan dari candu merah.

Ada dua macam masakan candu, yaitu :

1. Candu masakan dingin(cingko)
2. Candu masakan hangat (jicingko).

Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morphin tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitaman-hitaman.

Candu dan opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau). Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa pethidine dan methadone digunakan sebagai obat.

b. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika terpadat pada candu merah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles Of Medical Practice* By John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :

1. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram
2. Menolak penyakit mejan (diare)
3. Batuk kering yang tidak mempan *codoine*

4. Dipakai sebelum diadakan pembedahan
5. Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah karena tekanan darah berkurang
6. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).²²

Tetapi bila pemakaian morphine disalah gunakan maka akan selalu menimbulkan katagihan phisi bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi bersama anatar morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa amti seketika.

d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca* . untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine anatar lain sebagai berikut:

1. Termasuk golongan tanaman perdu dan belukar

²² B.P Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*,(Jakarta:Amanah R.I, 1985), Hal.33

2. Di indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur
3. Tumbuh setinggi kira-kira 2 (dua) meter
4. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai
5. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah masak.

e. Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabi sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana dalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja. Ganja di indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau daerah lain pun bisa tumbuh.

Ganja terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat. Yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuat rokok ganja.

Selain dikenal sebagai beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu:

1. Minyak ganja
2. Danar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan.
3. *Budha stick atau thai stick*.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikotropika, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sintesis ini dibagi menjadi 3 bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

1. Depressants

Depressants atau depresi, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sebagai berikut:

- a. Sedativ/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b. Tranguilizer (obat penenang)
- c. Mandrax
- d. Ativan
- e. Valium5
- f. Matalium
- g. Rohypol
- h. Nitrazepam
- i. Megadon, dan lain-lain

Pemakaian obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

2. Stimulants

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depresantas, yaitu menyebabkan peningkatan kewaspadaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants anatar lain sebagai berikut:

- a. Amfetamine/ectacy
- b. Meth-Amphetamine,/shabu-shabu
- c. Kafein
- d. Kokain
- e. Khat
- f. Nikotin

Obat – obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3. *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- a. L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide)
 - b. P.C.D (phencylidine)
 - c. D.M.T (Demithyltrytamine)
 - d. D.O.M (Illicit Form Of STP)
 - e. Psilacybe Mushrooms
 - f. Peyote Cactus, Buttons dan Ground Buttons
4. Obat adiktif lain

Yaitu yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguher, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan muka merah, bicara kacau, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya napza diatas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika/napza, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok :

- a. Golongan narkotika (golongan I) seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain
- b. Golongan Psikotropika (Golongan II) seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain

- c. Golongan zat adiktif lain (Golongan III) yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer,wine, whysky, vodka dan lain-lain.²³

3. Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu jta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau orban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *Self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada paparan diatas, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat di emplementasikan, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut.

²³ Taufik Makkaro dkk, "*Tindak Pidana Narkotika*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.24

1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanffatkan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkoba. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk amksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika
2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:
 - a. Membuktikan keberadaan dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko. Misalnya ngebut dijalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dn lain-lain.
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu
 - c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
 - e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup
 - f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan kerana tidak ada kegiatan
 - g. Menghilangkan rasa frustasi dan gila
 - h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan

- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng²⁴

Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

- 3. Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan
 - a. Pelaku utama
 - b. Pelaku peserta
 - c. Pelaku pembantu

Untuk menentukan apakah pelaku tergolong kedalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini.

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diuraikan diatas

- b. Pengedaran narkoba

Karena berkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional

- c. Jual beli narkoba

Ini pada umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi kepuasan.

Dan ketiga bentuk pidana narkoba adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang

²⁴ Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No.6 Tahun 1976. H. 8-9

secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan trauma bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penjambretan
4. Pemerasan
5. Pemerkosaan
6. Penipuan
7. Pelanggaran rambu lalu lintas
8. Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

Sanksi hukuman berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (punishment) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (treatment).

C. PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sametions and punishment*).²⁵

Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrech* dari bahasa belanda.²⁶

Satochid Kartanegara, mengemukakan :

Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.²⁷

Selanjutnya Prof. Moelyanto mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut

²⁵ Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan* (Cet 1; Malang: Setara Press, 2015), h 1

²⁶ Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, h.2

²⁷ Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, h.2

²⁸ Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, h.2

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” dan pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman²⁹

Ada beberapa teori – teori yang telah dirumuskan para ahli untuk menjelaskan secara detail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adam teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:³⁰

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori gabungan (*vernegins theorien*)

2. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum pidana dalam alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada

²⁹ Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, h.95

³⁰ Adam chazawi, *Pelajaran Hukumpidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukumpidan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001), h. 153

akhir abad yang ke-18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.³¹

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan³²

Menurut Stahl mengemukakan bahwa;³³

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.

Lebih lanjut berpendapat bahwa :³⁴

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*) . jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*sythese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa:³⁵

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

³¹ Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, h.98

³² Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di kota Makassar*, (Makassar : Perpustakaan Unhas, 2002), h.23

³³ Adam chazawi, *Pelajaran Hukumpidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukumpidan*, h. 155

³⁴ Adam chazawi, *Pelajaran Hukumpidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukumpidan*, h.156

³⁵ Adam chazawi, *Pelajaran Hukumpidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukumpidan*, h. 156

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping itu terdapat pula tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maaeshappeljikeorde*)

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui ppidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁶

Teori-teori yang dimaksudkan dalam prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Laminantang sebagai berikut:³⁷

1. Teori – teori ini mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran –pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.

³⁶ A mir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*, h. 99

³⁷ Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di kota Makassar*, h.25

2. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan Anselm Feuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti bahwa orang yang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat³⁸

c. Teori Gabungan (vernegins theorie)

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:³⁹

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak sapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan masyarakat:⁴⁰

“Pidana” bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan

³⁸ Adam chazawi, *Pelajaran Hukumpidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukumpidan*, h.158

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 36

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 36

memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

3. Jenis – jenis Pidana Menurut UU No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴¹

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hukum

⁴¹https://id.wikipedia.org/wiki/KitabUndang-Undang_Hukum_Pidana/Sejarah (diakses pada tanggal 1 September 2017)

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan tindakan)
- b. Pidana tambahan ini tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

4. Pidana Mati

Penerapan hukum mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktik hukum mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda telah menghapus hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka. Namun untuk kejahatan militer, hukum mati masih tetap dipertahankan Belanda.⁴³

⁴² Amir Ilyas, S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, h.107

⁴³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal dari kitab UU Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media Tama,2003),h.459

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Dalam situs akhir-akhir ini, hukuman mati yang akan dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga negara Asing sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkoba. Namun harus dipahami bahwa kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seperti narkoba tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Bahkan percaya dan menyatakan “Indonesia menghargai upaya sekjen PBB untuk melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah dari si pelaku kejahatan, namun menyayangkan sikapnya yang didasarkan pada pemahaman sempit dan sepihak⁴⁴

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lamborso, H.G Rambonnet dan H.B Vos adalah:

- a. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat
- b. Sebagai perwujudan pembalasan
- c. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi
- d. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara

⁴⁴ OK.Mohd.Fajar Ikhsan,”*Hukuman Mati Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara*”, 30 Agustus 2016. <http://kabarmedan.com>.(di Akses 1 September 2017)

e. Menakutkan orang lain hingga tidak berani berbuat.⁴⁵

Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan engara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif ini disini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah⁴⁶

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu:⁴⁷

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (kepala Presiden) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan graso

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan⁴⁸

Sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

⁴⁵ Tina Asnarawti, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2013), h.82

⁴⁶ Phillip Nonet & Phillip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusamedia, 2007), h.33

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Untuk Para Penjabat Kepolisian, Kedjaksaab, Pamong-Praja Dsb.* (Bogor : Politeai, 1956)

⁴⁸ Am Amir Ilyas, S.H., M.H., *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*, h. 110

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga)⁴⁹

Larangan – larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang- Undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa pihak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana kasus yang dapat mengancam dengan hukuman yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika(obat) secara

⁴⁹ Undang-Undang Narkotika (UU 35 Tahun 2009)

berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Tinjauan Yuridis penjatuhan mati terhadap tindak pidana pengedaran narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar). Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yang difokuskan di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹ Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang mengatur

¹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 32.

terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Normatif adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, adapun yang menjadi data primer adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peeliti dengan Hakim yang ditunjuk instansinya yaitu Pengadilan Negeri Makassar untuk menjadi informan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literature-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu bentuk penelitian dengan cara mengupulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur mengenai hukum, undang-undang , internet , serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantiya. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur mengenai hukum, undang-undang internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Wawancara,³ yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data lapangan adalah wawancara, kepustakaan, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

³Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Social Cet.V* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), h. 58.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dengan tahapan , antara lain Seleksi data, Pemeriksaan data, Klasifikasi data dan penyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan serta kejelasan.
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam medeskripsikanya.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menuut aturan yang sistematis sebagai hasil pnelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif maksudnya menganalisis data yang dilakukan dengan menjabarkan seacara rinci kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebh jelas terhadap permasalahan yan diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Demi terjaminnya kekuratan data maka peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang

salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat⁴



⁴ Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabet, 2009), h.270

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

1. Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a) Pidana pokok:

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda

b) Pidana tambahan

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Dengan demikian, maka pidana mati didalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok yang masih diakui eksistensinya.

Bentuk pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial yang banyak mengandung pro dan kontra dikalangan ahli hukum dari berbagai bentuk pidana

lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*Wet boek van strafrecht*" yang mulai berlaku pada Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dengan Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tahun 1964, Lembaga Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Patut diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan garasi kepada presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden(flat execute).

Maka jelaslah disini bahwa pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana pemidanaan yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan

terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan Negara sekalipun.

2. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Berdasarkan Pasal 11 KUHP:

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Seiring dengan peradaban manusia cara menggantung terpidana dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam S. 1945 : 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatukan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jendral dilakukan dengan cara menembak mati”. Untuk ketentuan pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada UU No 2 (PNPS) tahun 1964.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan.

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

- a) Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila

kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu pesan tersebut diterima oleh jaksa;

- b) Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- c) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengaduan tingkat 1 yang bersangkutan;
- d) Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
- e) Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
- f) Kepala polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- g) Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
- h) Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga;
- i) Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan dalam surat putusan pengadilan.

3. Pro dan Kontra Pidana Mati

Dari segi pro pidana mati pada umumnya dikemukakan alasan sebagai berikut.¹

¹J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung Alumni), h. 71.

- a) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi, masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini.
- b) Pidana mati merupakan suatu alat resepsi yang kuat bagi pemerintah terutama dalam memerintah daerah Hindia Belanda.
- c) Dengan alat resepsi yang kuat ini, kepentingan masyarakat dapat dijamin, dengan demikian, ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi
- d) Alat resepsi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.
- e) Terutama dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbul rasa takut untuk berbuat kejahatan.
- f) Ethoven mengutip pendapat dari lambroso, bahwa dengan dijatuhkannya serta dilaksanakannya pidana mati, maka akan ada seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur- unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri dari warga yang baik-baik saja
- g) Gorofalo ikut menguatkan pendapat Lambrosso, dikemukakan bahwa dengan diaksanakannya pidana mati terhadap lebih-kurang 70.000 orang dengan berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan Eduard VI dan Elisabeth, maka terbukti bahwa kejahatan berkurang banyak sekali

Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibuthkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi yang beralih dalam waktu yang singkat.

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawasi Arif secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Hal ini dapat penulis gambarkan melalui pendapatnya yang menyatakan:²

“bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat,(jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi kepada kepentingan masyarakat),namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.

Sedangkan alasan kontra pidana mati muncul dari para sarjana hukum Belanda yang menggolongkan diri dalam barisan abolisi, dengan alasan sebagai berikut :³

- a) Pada umumnya para sarjana hukum Belanda yang menentang Pidana mati (selanjutnya disebut abollisionis) tidak dapat mengerti berdasarkan asas kontradiksi pidana mati tetap dipertahankan di Hindia Belanda.
- b) Para Abolisionis berpendapat bahwa pidana mati bukanlah pidana karena pidana mati tidak memenuhi kriteria yang diisyaratkan bagi pidana Dalam pidatonya, menteri Modderman berpendapat bahwa :

- 1) Pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat.

²[Http://dickyputraarumawan.blogspot.co.id/2015/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html](http://dickyputraarumawan.blogspot.co.id/2015/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html) (diakses pada tanggal 10 Januari 2018)

³J.E.Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung Alumni), h.72.

- 2) Dengan dijatuhi pidana mati maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah tutup sama sekali.
 - 3) Kepastian bahwa keputusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebagaimana pun hakim tetap seorang manusia.
 - 4) Dengan dilaksanakannya pidana mati, maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi.
 - 5) Putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat.
- c) Nyawa seorang manusia sekalipun ia seorang penjahat besar, tidak boleh dicabut begitu saja dengan eksekusi pidana mati; juga menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pribumi yang dikulifikasi sebagai “penduduk kurang berbudaya dan kurang berpendidikan”
 - d) Kalau pidana mati dianggap sebagai suatu alat untuk menentukan calon-calon penjahat maka sulitlah untuk menakutkan calon-calon penjahat, maka sulitlah untuk menerima tentang dasar adanya lembaga grasi yang kontroversial itu.
 - e) Sulit untuk dipahami, kalau pidana mati berfungsi untuk menakutkan, dimana pelaksanaannya dilaksanakan di tempat tertutup, dan tidak dapat dilihat oleh umum.
 - f) Pidana mati bukan sebagai alat ampun yang dapat menakutkan para calon penjahat. Dengan dihapusnya pidana mati di Belanda misalnya kejahatan trnata tidak bertambah.

- g) Dikemukakan oleh para Abollsionis bahwa ajaran Kant dan Hegel tentang pembalasan yang murni kini sulit dipertahankan. Teori absolut secara praktis tidak mempunyai penganut lagi, serta tidak mempunyai dasar pmikiran yang kokoh dewasa ini.

Selanjutnya dalam pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”⁴

4. Pidana Mati dalam Perspektif HAM

Jika kita berpegang pada prinsip dan norma hak-hak asasi manusia, hukuman mati memang harus ditolak atau dihapuskan, karena bertentangan dengan prinsip atau norma tersebut. Terlepas dari beratnya tindak pidana yang didakwakan atas seseorang Hak untuk hidup ini sangat ditekankan untuk

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), h. 123.

dihormati dan dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 serta pasal 4 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁵ Terhadap masalah tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dilihat sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun jika Pancasila dilihat secara Parsial (menitik beratkan pada salah satu sila), ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila, adapula yan menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila jadi, pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila.
- b) “Hak untuk hidup” (Pasal 28A Jo Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan “Hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” (Pasal 33 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan “pidana mati”. Hal ini sama dengan “hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) atau ha katas kemerdekaan (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara”. Apabila dihadapkan secara diametral, berarti pidana “penjara” pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Hak Asasi

⁵Kompas, ‘hukuman mati dilihat dari perspektif hak asasi manusia’, Situs Resmi Kompas .[http://www.kompasiana.com/suciana0496/hukuman mati-dilihat dari perspektif hak asasi manusia](http://www.kompasiana.com/suciana0496/hukuman-mati-dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia) (di akses 28 Januari 2018)

Manusia karena pidana penjara pada hakikatnya adalah “prampasan kemerdekaan/kebebasan”

Sebagaimana yang kita pelajari semua ketika mempelajari “Teori Hukum”, khususnya tentang berbagai metode penemuan hukum oleh hakim, maka kita ketahui bahwa salah satu jenis interpretasi adalah interpretasi sistematis yang pada pokoknya adalah suatu pasal atau subpasal dalam perundang-undangan lain. Hukum senantiasa harus dilihat sebagai “satu system utuh”, dan tidak parsial.⁶

Dengan demikian pasal 28 A dan pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, harus dihubungkan dengan pasal 28 J yang merupakan pengecualian dan *lex specialis* yang menentukan:

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J inilah yang menjadi dasar utama pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi kriteria ada dalam pasal 28 J.

⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Realita Hukum* (Jakarta :Media Grafika, 2010) , h. 34

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kepemilikan Narkoba Gol.1 dalam putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menuraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pengedaran Narkotika (Studi Kasus : No.469/Pid.Sus/2015/PN.Mks),maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan yang sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa benar pada hari sabtu 17 januari 2015 di depan Hotel Singgasana Makassar sekitar pukul 02.00, ketika diadakan operasi cipta kondisi oleh polsek Ujung Pandang, kemudian melintas sebuah taksi, setelah diperiksa ditemukan 3 bungkus shabu-shabu dikantong celana Michel Wibsono, dan setelah diinterogasi mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian kepada Michel diminta untuk menghubungi Terdakwa. melalui telpon, bahwa Terdakwa sedang berada di studio 33 Hotel Clarion Makassar.

Kemudian setibanya di Studio 33 mendapati terdakwa pada room 316 bersama seorang laki-laki dan 2 orang wanita sedang menikmati music, kemudian dilakukan penggeledahan, namun tidak didapati barang bukti, namun setelah tiba, terdakwa sendiri yang menunjukkan sebuah tas di atas lemari, yang berisi 1 paket

besar shabu-shabu, kemudian diinterogasi dan mengakui sebagian disimpan di sebuah rumah di jalan Lamadukelleng Buntu Makassar.

Kemudian kepolisian dan Terdakwa menuju lokasi tersebut, yang didalamnya ada 1 keluarga di dalam rumah. Kemudian terdakwa menunjukkan lantai 2 kamar temannya. Kemudian tersangkan mengambil shabu-shabu dan 3 bungkus besar berisi pil extasy, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Clarion Studio 33 Jln. A.P. Pettarani Makassar Pengadilan Negri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada saat Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIR Alias ARDI DG.NAI Alias ACO ALIAS YUDI Berada di pulau Kalimantan kemudian menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasy dari Lk,IWAN (DPO), selanjutnya shabu-shabu dan Pil Ekstas tersebut Terdakwa bahwa ke Makassar dan setelah berada di Makassar kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 12.00 bertempat di Pondok Rajawali Kamar No.205 Jl. Rajawali Makassar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis

shabu-shabu kepada Lk. MICHEL WIBISONO (yang penuntutanya diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah menerima penyerahan shabu-shabu tersebut kemudian Lk. MICHEL WIBISONO pulang hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 00.30 Wita Lk.MICHEL WIBISONO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan sedang membawa atau memiliki 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan setelah di interogasi kemudian Lk. MICHAEL WIBISONO mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian menyuruh Lk.MIHAEL WIBISONO untuk menelpon Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan kalau sedang berada di Hotel Clarion Studio 33 Jl.A.P.Pettarani Makassar, sehingga petugas Kepolisian membawa Lk.MICHAEL WIBISONO untuk menemui Terdakwa ditempat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa shabu-shabu miliknya Terdakwa simpan dirumah kostnya di Jl. Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No.17 Makassar, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Tredakwa ke rumah kostnya tersbut dan didalam rumah kost Terdakwa tersebut ditemukan 1(satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya, kemudian Terdakwa mengakui lagi kalau barang berupa shabu-shabu miliknya sebagian lagi Terdakwa simpan dirumah keluarganya di Jl. Lamadukkelleng Buntu

Makassar sehingga petugas Kepolisian membawa Terdakwa Ketempat tersebut dan setelah tiba kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 8 (delapan) bungkus/sachet berisi Narkotika jenis shabu-sabu dan 8 (delapan) bungkus/Sachhet berisi Pil Ekstasy sebanyak 4208 butir yang Terdakwa simpan didalam koper warna hitam kemudian ditemukan pula peralatan berupa 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skill, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polrik Caban Makassar No. Lab : 136/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto masing-masing : sachet I seberat 81,2806 gram, Sachhet II seberat 95,3402 gram, Sachet III seberat 94,3154 gram, Sachet IV seberat 95,4075 gram, Sachet V seberat 84,6185 gram, Sachhet VI seberat 74,7314 gram, Sachhet VII seberat 80,1207 gram, Sachhet VIII seberat 93,4134 gram, Sachet IX seberat 94,2996 gram, Sachhet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, Sachhet XII seberat 24,5206 gram dan Sachhet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, Sachhet XII seberat 24,5206 gram dan Sachet gram dan XIII seberat 2,1064 gram, jumlah berat netto keseluruhanya 921,72565 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks

berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0452 gram milik Lk.AMIRUDDIN Alias ARDI DG.NAI Alias Aco Alias YUDI Bin AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastic berisi tablet warna kuningh dengan logo “Channel masing-masing berjumlah : Bungkus 1 sebanyak 2005 butir, bungkus II sebanyak 1503 butir, bungkus III sebanyak 252 butir, bungkus IV sebanyak 160 butir, bungkus V sebanyak 99 butir, bungkus VI sebanyak 99 butir, bungkus VII sebanyak 45 butir dan bungkus VIII sebanyak 45 butir, jumlah keseluruhan sebanyak 4208 butir milik Lk.AMIRUDDIN Alias ARDI DG.NAI Alias ACO Alias YUDI Bin AMIN adalah benar mngandung MDMA(±)-N-a-dimetil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilama terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa iya Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam taun 2015, bertempat di Hotel Clarion Studio 33 Jln.A.P.Pettarani Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, meyediakan Narkotika

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal pada saat petugas Kepolisian menangkap Lk.MICAEL WIBISONO (yang penuntutanya diajukan dalam berkas terpisah) karena telah ditemukan membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian menyuruh Lk. MICHAEL WIBISONO untuk menelpon Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan sedang berada di Hotel Clarion Studio 33 Jl. A. P. Pettarani Makassar, sehingga petugas Kepolisian membawa Lk. MICHAEL WIBISONO untuk menemui Terdakwa ditempat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa shabu-shabu miliknya Terdakwa simpan dirumah kostnya di Jl. Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No. 17 Makassar, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah kostnya tersebut dan didalam rumah kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya, kemudian terdakwa mengakui lagi kalau barang berupa shabu-shabu miliknya sebagian lagi terdakwa simpan dirumah keluarganya di Jl. Lamadukelleng Buntu Makassar sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa ketempat tersebut dan setelah tiba kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 12

(dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 8 (delapan) bungkus/sachet berisi Pil Ekstasi sebanyak 4208 butir yang terdakwa simpan dalam koper warna hitam kemudian ditemukan pula peralatan berupa 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skill, selanjutnya terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 136/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto masing-masing: Sachet I seberat 81,2806 gram, sachet II seberat 95,3402 gram, sachet III seberat 94,3154 gram, sachet IV seberat 95,4075 gram, sachet V seberat 84,6185 gram, sachet VI seberat 74,7314 gram, sachet VII seberat 80,1207 gram, sachet VIII seberat 93,4134 gram, sachet IX seberat 94,2996 gram, sachet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, sachet XII seberat 24,5206 gram, dan sachet XIII seberat 2,1064 gram, jumlah berat netto keseluruhannya 921,7265 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0452 gram milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan logo “Channel” masing-masing berjumlah : Bungkus I sebanyak 2005 butir, bungkus II sebanyak 1503 butir, bungkus III sebanyak 252 butir, bungkus IV sebanyak 160 butir, bungkus V sebanyak 99 butir, bungkus VI sebanyak 99 butir, bungkus VII sebanyak 45 butir, bungkus VIII sebanyak 45 butir, jumlah keseluruhan sebanyak 4208 butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana Pengedaran Narkotika Golongan I, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- a) Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli

narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama ;

- b) Menjatukan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG.NAI Alias ACO Alias YUDI, oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
- c) Menyatakan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 921,7265 gram, 8 (delapan) bungkus pelastik berisi 4.208 butir pil ecstasy warna kuning dengan logo “Chanel”, 2 (dua) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah koper warna hitam merk Insight dan 1 (satu) buah tas coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
- d) Menetapkan agar Terdakwa dubebani membayar biaya perkara sebesar RP.5000,- (lima ribu rupiah),

4. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ibrahim Palino, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman Nyompa S.H., M.H dan Ktistian P. Djati S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Nur Frianty,

S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
- c) Memerintahkan supaya barang bukti berupa;
 - 1) 13 (tiga belas) sachet plastik being berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 921,7265 gram;
 - 2) 8 (delapan) bungkus plastik berisi 4.208 butir pil ekstasi warna kuning dengan logo” Chanel”
 - 3) 2 (dua) buah pipet kaca/pireks;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk kris Chef;
 - 5) 1 (satu) buah koper warna hitam merk Insight;
 - 6) 1 (satu) buah tas coklat.

Semuanya dimusnahkan

- d) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal pada saat Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI berada di pulau Kalimantan tepatnya di kota Bontang, menerima peyerahan Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasy dari IWA (DPO), selanjutnya shabu-shabu dan Pil Ekstasy tersebut Terdakwa bawa ke Makassar mempergunakan kapal yang disewa Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Bahwa setelah berada di Makassar, Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Pondok Rajawali Kamar No. 205 Jl. Rajawali Makssar Terdakwa menyerahkan sebagian dari shabu-shabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Shabu-Shabu yang menurut Terdakwa beratnya 50 (lima puluh) gram kepada Michael Wibisono.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 di depan Hotel Singgasana Makassar sekitar pukul 00.30, ketika diadakan Operasi Cipta Kondisi, Michael Wibisono lewat menumpang sebuah taksi kemudian taksi tersebut dihentikan oeh petugas kepolsian dan ketika dilakukan pengeledahan di atas mobil taksi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yag dibawa oleh Michael Wibisono dan setelah dilakukan interogasi terhadap Micahel Wibisono mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa ;
- d. Bahwa setelah mendapat informasi kalai Michael Wibisono memperoleh shabu-shabu yang ditemukan petugas itu dari Terdakwa, maka petugas Kepolisian menyuruh Michael Wibisono untuk menelpon Terdakwa dan

oleh Terdakwa menjawab kalau ia sedang berada di hotel Clarion Studio 33 Jl. A. P. Pettarani Makassar, kemudian petugas Kepolisian membawa Michael Wibisono untuk menemui Terdakwa ditempat tersebut;

- e. Bahwa setelah sampai di hotel Clarion Studio 33 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan penangkapan terhadap Terdakwa pada malam itu, namun tidak ditemukan narkoba, namun setelah diinterogasi secara intensif, akhirnya Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu yang Terdakwa simpan di rumah kostnya di Jl. Andi Tonro Kompleks Perumahan Graha Modern Jaya Blok B No. 17 Makassar ;
- f. Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah kostnya tersebut dan didalam rumah kost Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam lemari pakaiannya, kemudian Terdakwa mengakui lagi kalau barang berupa shabu-shabu miliknya sebagian lagi Terdakwa simpan di rumah keluarganya di Jl. Lamadukelleng Buntu Makassar ;
- g. Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ketempat yang ditunjuk Terdakwa yaitu di sebuah rumah Jl. Lamadukelleng Buntu dan setelah tiba di rumah tersebut petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 8 (delapan) bungkus/sachet berisi Pil Ekstasi sebanyak 4208 butir yang Terdakwa simpan dalam koper

warna hitam kemudian ditemukan pula peralatan berupa 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/skill, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 136/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto masing-masing: Sachet I seberat 81,2806 gram, sachet II seberat 95,3402 gram, sachet III seberat 94,3154 gram, sachet IV seberat 95,4075 gram, sachet V seberat 84,6185 gram, sachet VI seberat 74,7314 gram, sachet VII seberat 80,1207 gram, sachet VIII seberat 93,4134 gram, sachet IX seberat 94,2996 gram, sachet X seberat 46,8536 gram, sachet XI seberat 54,7326 gram, sachet XII seberat 24,5206 gram, dan sachet XIII seberat 2, 1064 gram, jumlah berat netto keseluruhannya 921,7265 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0452 gram milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan logo

“Channel” masing-masing berjumlah : Bungkus I sebanyak 2005 butir, bungkus II sebanyak 1503 butir, bungkus III sebanyak 252 butir, bungkus IV sebanyak 160 butir, bungkus V sebanyak 99 butir, bungkus VI sebanyak 99 butir, bungkus VII sebanyak 45 butir, bungkus VIII sebanyak 45 butir, jumlah keseluruhan sebanyak 4208 butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- i. Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap di Makassar, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindakan peredaran gelap narkotika dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan masing-masing :
 1. Putusan No. 134/PID/2010/PT.KT. SMDA, tanggal 21 Oktober 2010, dengan pidana penjara selama 6 tahun ;
 2. Putusan No. 123/Pid.Sus/2011/PN.Bpp. tanggal 11 Oktober 2011, dengan pidana penjara selama 6 tahun ;
 3. Putusan No. 112/Pid/2013/PT.KT.SMDA. tanggal 20 November 2013 dengan pidana penjara selama 20 tahun ;

Bahkan menurut keterangan dari Kepala Rutan Balikpapan bahwa Terdakwa dihukum terakhir dengan pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, Majelis Hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks adalah:

- a) Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan, maka pembelaan penasehat hukum Terdakwa, yang belum secara spesifik dipertimbangkan dalam uraian di atas, sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;
- b) Sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa.
- c) Penuntut umum dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa supaya dijatuhi pidana mati, sedangkan Terdakwa dan penasihat hukumnya melihat agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman mati, dan jika majelis berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya.
- d) Terkait mengenai pidana mati yang merupakan salah satu jenis pidana yang eksistensinya masih berlaku dalam hukum positif Indonesia Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana sudah jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana sudah jelas diatur tentang jenis pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.
- e) Dalam pandangan majelis hakim bahwa penjatuhan hukuman mati tidak semata-mata karena pelaku atau terdakwa melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana mati, dan tetapi lebih dari itu agar orang lain tidak melakukan kejahatan atau mencegah orang lain untuk tidak

berbuat serupa. Bahwa peredaran narkoba dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang-ulang adalah sangat membahayakan kehidupan manusia yang beradap sehingga tidak sekedar dipandang sebagai masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan sudah sangat erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan/social dan rasa keadilan masyarakat yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia.

f) Juga berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sudah tiga kali dijatuhi pidana penjara dalam kasus peredaran narkoba berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yakni dalam:

- 1) Putusan No 134/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 21 Oktober 2010, dengan pidana penjara selama 6 tahun.
- 2) Putusan No. 123/Pid.Sus/2011/PN.Bpp, tanggal 11 Oktober 2011 dengan pidana penjara selama 6 tahun;
- 3) Putusan No. 112/Pid/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 20 November 2013 dengan pidana penjara 20 tahun

Sehingga total hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 32(tiga puluh dua) tahun, dimana letak kejahatan yang dilakukan Terdakwa bahkan dilakukan dari balik jeruji besi, maka sesungguhnya penjatuhan pidana sama sekali tidak membuat efek jera, bahkan ketika Terdakwa sudah melarikan diri dari penjara, Terdakwa tetap melakukan Kejahatan serupa

- g) Dalam peredaran narkoba yang dilakukan di Balikpapan sudah tiga kali dijatuhi pidana penjara, sehingga sudah terbukti bahwa Terdakwa sudah termasuk residivis
- h) Bahwa semua barang bukti yang disita oleh penyidik berupa:
- 1) 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 921, 7265 gram;
 - 2) 8 (delapan) bungkus plastik berisi 4.208 butir pill ekstasi warna kuning dengan logo ‘Channel’;
 - 3) 2 (dua) buah pipet kaca/pireks ;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk kris Chef ;
 - 5) 1 (satu) buah koper warna hitam merk Insight ;
 - 6) 1 (satu) buah tas coklat.

Karena barang bukti tersebut adalah ilegal dan telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan

- i) Sebelum menentukan hukuman yang pantas dan adil bagi Terdakwa akan ditengahkan beberapa hal yang memberatkan pembedaan dan meringankan pembedaan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa sudah 3(tiga) kali pernah dihukum (residivis) dalam kasus narkoba dan sudah dijatuhi pidana penjara dengan total pidana yang dijatuhkan yaitu 32 tahun.
- 2) Perbuatan terdakwa sangat membahayakan masyarakat pada umumnya;

- 3) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- 4) Narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini jumlahnya banyak, yakni shabu-shabu sebanyak 921,7265 gram dan pil ekstasi sebanyak 4.208 butir dalam perkara Terdakwa sebelumnya di Pengadilan Negeri Balikpapan jumlah barang buktinya sekitar 2 (dua) kg shabu-shabu

Hal-hal yang meringankan

- 1) Tidak ada:

6. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik dalam proses persidangan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dala surat dakwaanya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang Tindak Pidana Pengedaran Narkotika oleh AMIRUDDIN Bin AMIN Alias Ardi DG. NAI Alias ACO Alias YUDI yang dalam putusan hakim dijatuhi Hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam pengedaran Narkotika Gol.I. dalam kasus ini surat dakwaan yang dikeluarkan Oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah memenuhi syarat formil yang sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 142 ayat 2 dan 3:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a) Setiap orang; bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis hakim telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

- b) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur atas perbuatan tersebut yaitu apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, maka terpenuhinya unsur tersebut. Terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam suratuntutannya berbandapat bahwa unsur tersebut telah terbukti terpenuhi dengan alasan hukum pada pokoknya berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa terdakwa telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang.

- c) Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berfokus pada beratnya narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yakni jika narkotika itu adalah berupa tanaman maka beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon. Dan apabila dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya lima gram. Sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil disita petugas kepolisian beratnya adalah 921,7265 gram dan pil ekstasi sebanyak 4.208 (empat ribu dua ratus delapan) butir, ditambah lagi dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Michel Wibisono yang menurut pengakuanya terdakwa beratnya adalah 50 (lima puluh) gram, dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah bentuk narkotika bukan tanaman.

Dari fakta dan bukti-bukti yang dibawa dalam persidangan maka dapat dibuktikan AMIRUDDINN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI Narapidana yang kabur dari lapas kelas IIA Balikpapan, yang dalam perkara ini tertangkap dalam daerah kewenangan Kepolisian Sulawesi Selatan, dengan menyembunyikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang diberikan kepada terdakwa Michel Wibisono seberat 50gram, dengan total 971,7265 gram. Dan pil

ekstasi sebanyak 4208 butir milik AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG. NAI Alias ACO Alias YUDI adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Gol. I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Narkotika.

Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana Mati terhadap terdakwa, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika, dimana hukuman maksimal nya adalah Pidana Mati dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat

melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Tindak pidana peredaran Narkotika menurut penulis merupakan kejahatan yang luar biasa, karena melihat fakta efek setelah penggunaan Narkotika yang juga dapat menyebabkan lainnya tindakan-tindakan kriminal. Perbuatan Terdakwa juga merusak generasi muda, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sedang berada darurat narkotika. Hal tersebut dikatakan Kepala BNN. Menurut beliau, pada Juni 2015 tercatat ada sebanyak 4,2 juta pengguna narkoba dan meningkat pada Oktober 2015 menjadi 5,9 juta orang.⁷

Serta Terdakwa diketahui merupakan residivis dimana Dan menurut penulis apa yang majelis Hakim putuskan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa merupakan hal yang sangat tepat, karena berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti belum lagi pemberatan karena berstatus residivis terhadap kasus yang sama, juga karena Terdakwa yang merupakan buron dari Kepolisian Balikpapan karena kabur dari Penjara dengan cara membobol plafon lapas. Kemudian di tangkap lagi di Makassar Serta posisi kasus Terdakwa sebelumnya di Balikpapan yang dipidana penjara 20 tahun atas kepemilikan 2 kg Narkotika jenis shabu-shabu.

⁷Kabar 24 Bisnis, Kepala Bnn Indonesia darurat Narkotika”, *Situs Resmi Kabar Bisnis 24*. Com 11 November. [Http://kabar24.bisnis.com](http://kabar24.bisnis.com) (di akses 6 Januari 2018)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan di antaranya sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tindak pidana Pengedaran Narkotika pada perkara Putusan Nomor : 469/PID.SUS/2015/PN.MKS telah sesuai dan memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
2. Penjatuhan pidana mati kepada pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat tapi tidak mencapai tujuan prevensi umum yaitu agar orang-orang secara umum yang bertujuan untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya bahwa eksekusi pidana mati tidak dilakukan di muka umum berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dijatuhkan pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 9 yang

berbunyi: Pidana Mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Berdasarkan teori pencegahan khusus yang sudah tidak dapat dipenuhi, karena terpidana sudah di eksekusi mati, maka dilihat dari teori Pencegahan Umum dengan tujuan mankuti-nakuti khalayak umum, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi yang melaksanakan Hukuman Mati (Qisas) di lakukan setiap jumat, setelah salat jumat. Dilakukan di tempat umum agar semua warga melihat dengan penjagaan ketat oleh aparat keamanan. Dan terbukti hukuman mati dapat membuat kriminalitas di Arab Saudi menurun. Karena salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa ini yakni peredaran narkotika yang sangat amat mengkhawatirkan dan indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 sudah di anggap sangat tepat dikarenakan untuk memberikan efek jera di tujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang masih menjadi pelaku pengedar Narkotika agar segera berhenti karena sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedar narkotika ialah pidana mati.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana mati yang merupakan pidana pokok dalam KUHP merupakan hal yang kontroversial, maka dalam penjatuhan Majelis Hakim haruslah memperhatikan fakta-fakta persidangan, dan hal-hal diluar dari persidangan. Karena eksekusi pidana mati menyangkut nyawa dan hak hidup seseorang.
2. Eksekusi pidana mati banyak mengundang pro dan kontra. Tapi menurut penulis Hukuman Mati tetap harus sudah ditetapkan untuk ketentuan pidana yang sudah mengancam kepentingan umat manusia. Dalam hal pidana Narkotika, Indonesia yang saat ini benar-benar dalam keadaan Darurat Narkotika, agar dalam teori tujuan pembedaan dapat tercapai.
3. Selain dalam penjatuhan pidana mati, pemerintah juga lebih mengencangkan sosialisasi penyalahgunaan Narkotika dalam tahap preventif kepada Generasi Muda. Selain generasi muda, generasi pekerja perlu dilakukan, karena faktor-faktor sehingga para pengguna biasanya timbul dari lingkungan sekitar, dan kurang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda, B.P.1985.*Menanggulangi Bahaya Narkotika*. Jakarta: Amanah R.I.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak realita hukum*. Jakarta :Media Grafika
- Arief, Nawawi Bardi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Penerbit raja Grafindo Persada
- Asmarawati, Tina. 2013.*Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta :PT. Raja Grafindo.
- Dkk Prakoso, Djoko 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*.Jakarta: Bina Aksara.
- Dkk, Lubis Mulya. 2009 *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan pendapat Hakim konsitusi*, Jakarta : penerbit Buku Kompas.
- Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H. 2015. *Pembaruhan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang : setara Press
- Farid, Abidin Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1 Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fery,Nindra Ahmad.2002.*Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Makassar :Perpustakaan Unhas.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana* (EdisiRevisi). Jakarta: RinekaCipta.
- Hamzah,Andi.2005.*Hukum Acara Pidana Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang

Ismail.Wahyuni. 2014. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press.

Kancil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R., 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Kartanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Kementerian Agama RI. 2011 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Makarao, Taufik dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marpaung, laden 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki Mahmud. 2010. *Peter, penelitian hukum*. Jakarta : Kencana

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nonet, Philip & Selznick, Philip. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia

S.H. Kanter, E.Y 1982 *Asas-Asa S Hukum Pidana di indonesia*, Jakarta Alumni AHM-PTHM

Sahetapy, J.E. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap pembunuhan Berencana.
Bandung : Berencana Alumni

Sihab, Quraish M.. 2002 *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera hati.

Soedjono, D. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung:PT.
Karya Nusantara.

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D*.

Sutiyoso,Bambang. 2005 dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta:UII Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 Buku Pedoman 3,

Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1

Desember 1956

Sumber Internet

Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indonesia”. *Situs
Resmi Kontras*.

Bisnis24, “Ini Daftar Terpidana Mati Di Indonesia Yang Sudah
Dieksekusi” *Situs Resmi Kabar24*. 21 Januari 2015 <http://kabar24.bisnis.com>
(15 Agustus 2017).

[Http://dickyputraarumawan.blogspot.co.id/2015/02/vbehaviorurldefaultvml.html](http://dickyputraarumawan.blogspot.co.id/2015/02/vbehaviorurldefaultvml.html) (diakses pada tanggal 10 Januari 2018)

<http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper-Hukuman-Mati-di-Indonesia.pdf> (1 Agustus 2016)

hukum pedia. “Kepatutan Penerapan Hukuman mati di Indonesia”
<http://www.hukumpedia.com/dianahijri/kepatutan-penerapan-hukuman-mati-di-Indonesia> di akses (16 Agustus 2016)

Kabar 24 Bisnis, Kepala Bnn Indonesia darurat Narkoba”, *Situs Resmi Kabar Bisnis 24*. Com 11 November. [Http://kabar24.bisnis.com](http://kabar24.bisnis.com) (di akses 6 Januari 2018)

Kompas, “Jumlah Napi Narkotika Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera”, *Situs Resmi Kompas*. 11 May 2016
<http://nasional.kompas.com> (di Akses 15 Agustus 2017).

Kompas, ‘hukuman mati dilihat dari perspektif hak asasi manusia’, Situs Resmi Kompas .[http://www.kompasiana.com/suciana0496/hukuman mati-dilihat dari perspektif hak asasi manusia](http://www.kompasiana.com/suciana0496/hukuman-mati-dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia) (di akses 28 Januari 2018)

Kompas. “Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum” *Situs Resmi Kompas*, 26 Juli 2016
<http://nasional.kompas.com>. (15 Agustus 2017).

OK.Mohd.Fajar Ikhsan, “*Hukuman Mati Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara*”, 30 Agustus 2016. <http://kabarmedan.com>. (di Akses 1 September 2017
wikipedia.org. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Sejarah
<https://id.wikipedia.org/wiki/> (diakses pada tanggal 1 September 2017)



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSAR

MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor : 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI
DG.NAI Alias ACO Alias YUDI.**

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Andi Tonro Perumahan Graha
Modern Blok B No.17 Makassar.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :
Drs. Ing. ANDI WARE, SH.MH. ABDUL RAHMAN DALLE, SH.
MUHAMMAD YUNUS, SH. HERDIA, SH., Ketiganya Advokat / Penasihat
Hukum, berkantor di Jalan Hertasning Baru No.12 A Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2015.

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 22 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca dan memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG.NAI Alias ACO Alias YUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Bin AMIN Alias ARDI DG.NAI Alias ACO Alias YUDI, oleh karena itu dengan PIDANA MATI ;

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di
Samata-Gowa

Assalamu alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166
Semester/Klpl : VIII / (Delapan) D
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak pidana perdagangan orang di kota makassar (Studi kasus Putusan Pengadilan Negri Makassar)
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana pembunuhan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negri Makassar)
3. Tinjauan Yuridis penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana pengedaran narkotika (Studi kasus Putusan Pengadilan Makassar)

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terimakasih. *Wassalamu alaikum Wr. Wb*

Samata Agustus 2017

Mengetahui,
Penasehat Akademik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pemohon,

(Dr. Muhammad Sabir, M.Ag)
NIP. 196812281997031009

(A. Muhammad Nuzul Idris)
NIM : 10500113166



08 AUG 2017

RAHMAN SYAMSUDDIN, SH., MH
NIP. 19821207 200901 1 010

LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI

"Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati atas pengedaran
Narkotika (Studi Kasus PN Makassar)

Disusun dan diajukan Oleh :

A. Muhammad Nuzul Idris

NIM: 10500113166

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi

Pada tanggal : 1 Desember 2017

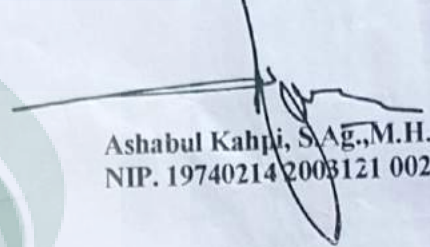
DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



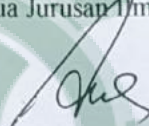
Dr.H. Muh.Saleh Ridwan, M.Ag.
NIP. 19640601 199303 1003

Pembimbing II



Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H.
NIP. 19740214 2003121 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah., S.H, M.H
NIP. 196801120 199503 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin., M.Ag

NIP.19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 4110 Tahun 2017
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing;**
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi.**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
2. Ashabul Kahfi, S.Ag., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :


Nama : A. MUHAMMAD NUZUL IDRIS
N I M : 10500113166
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus PN Makassar)".

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 2 November 2017

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudari Siti Aisyah, NIM : 10500113051 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul, **"Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (studi kasus Kejaksaan Negeri Enrekang)"**, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Makassar, 12 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Ashabul Kahfi. S.Ag., M.H.
NIP. 19740214 20081 1 009



Rahman Syamsuddin. S.H., M.H.
NIP. 19821207 200901 1 010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 1984 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI

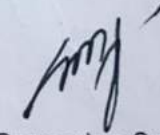
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan
 - Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
 - NIM : 10500113166
 - Jurusan : Ilmu Hukum
 - Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2017
 - Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
 - Judul : "Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Atas Peredaran Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Makassar)"
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 - Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H
 - Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum
 - Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
 - Pelaksana : 1. Herawati, S.H
2. Andriyanto, S.E
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : November 2017
Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar
Kampus II, Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-4664/SH.O1/PP.00.9/11 /2017
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Proposal

Samata Gowa, 27 November 2017

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H.. (Sekertaris)
3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
4. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (Penguji II)
5. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (Pembimbing I)
6. Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana.

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) pada Ujian Seminar Proposal / Skripsi, Insya Allah diilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2017
Waktu : Pukul 09.00 - 10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
(Sebagai Laporan)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : **HC** Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2018
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan A. Muhammad Nuzul Idris, NIM : 10500113166 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi IH tanggal 05 Februari 2018 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

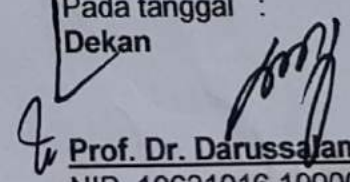
- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji Dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, Sebagai Berikut :

NO	NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
1	A Muhammad Nuzul Idris 10500113166	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.A	Prof. Dr. H. St. Aisyah Kara, M.A	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Istiqamah, S.H, M Drs. M. Ikhsan Zainuddin Sufirman

- Kedua** : Tugas **Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : Tugas **Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : Tugas **Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
- Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 05 Februari 2018
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa Hotline . 1500363

Nomor : B- 4928 SH.1/PP.00.9/12/2017
Lamp : 1 Proposal
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Samata, 13 Desember 2017

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : A.Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166
Semester : VII (Tujuh)
Fak/jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika (Putusan Pengadilan Negri Makassar)"

Dengan Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
2. Ashabul Kahpi, S.Ag,M.H

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai 12 Februari 2018.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 29 Desember 2017

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 283 /HKM/XII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **A. MUHAMMAD NUZUL IDRIS**
NIM : 10500113166
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Samata
Judul Skripsi : " Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Atas
Pengedaran Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri
Makassar) "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 21 Desember 2017 Nomor : B-4928/SH-01/PP.00.9/12/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2018

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2018
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 469/Pid. Sus/2015/PN.Mks)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H, M.H
Pelaksana : 1. Herawati, S.H
2. Dra. Hj. Wahida Rahim, M.M

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa

Pada tanggal : Februari 2018



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIR 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)

Nomor
Sifat
Hal

: B- /SH.O1/PP.00.9/02 /2018
: Penting
: Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, Februari 2018

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
4. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H (Penguji II)
5. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag (Pembimbing I)
6. Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
7. Pelaksana.

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/ Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2018
Waktu : 10.00 - 11.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



W. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : A. Muhammad Nuzul Idris

NIM : 10500113166

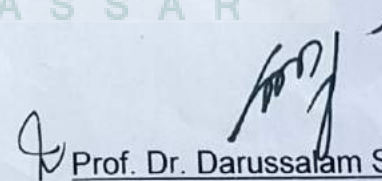
JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI: "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika
(Studi Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H, M.H	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Pembimbing	3. 
4.	Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Hamsir, M.Hum	Penguji	5. 
6.	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Penguji	6. 
7.	Herawati, S.H	Pelaksana	7. 
8.	Dra, Hj. Wahida Rahim, M.M	Pelaksana	8. 
9.	A. Muhammad Nuzul Idris	Mahasiswa	9. 

Samata Gowa, 21 Februari 2018

Ketua Panitia


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP : 19621016 199003 1 003

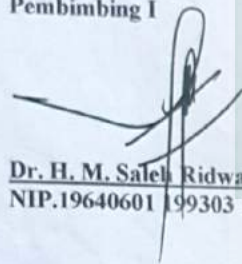
PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Penguji penulisan proposal skripsi Saudara, **A. Muhammad Nuzul Idris** NIM: **10500113166**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan yang berjudul, "**Tinjauan Yuridis Penjatuhan pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor : 469/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)**" memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke Sidang Munaqasyah/Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

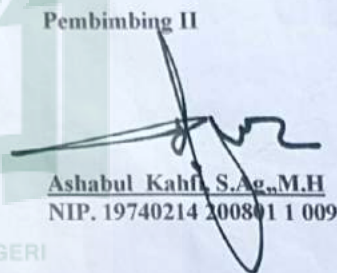
Gowa, 21 Februari 2018

Pembimbing I



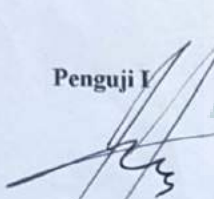
Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
NIP.19640601 199303 1 003

Pembimbing II



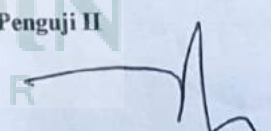
Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
NIP. 19740214 200801 1 009

Penguji I



Dr. Hamsir, S.H., M.Hum
NIP.19610404 199303 1 005

Penguji II



Rahman Syamsuddin, S.H, M.H
NIP. 19821207 200901 1 010

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : Tahun 2018
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113106
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Hafim Taffi, M.Ag
Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum
Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
Pelaksana : 1. Nurhayati Wahid
2. Nasirah Asri, S.Kom
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : Maret 2018

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar
Kampus II. Jl.H.M. Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- /SH.O1/PP.00.9/03/2018 Samata Gowa, Maret 2018
Sifat : Penting
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah/Skripsi**

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Sekertaris)
3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
4. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H (Penguji II)
5. Dr. H. M Safeh Ridwan, M.Ag (Pembimbing I)
6. Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H (Pembimbing II)
7. Pelaksana,
di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

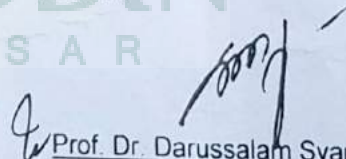
Nama : A. Muhammad Nuzul Idris
NIM : 10500113166
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Buka Sidang : 08.30 Wita
Waktu : Pukul 09.00- 10.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

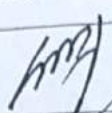
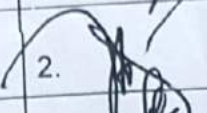


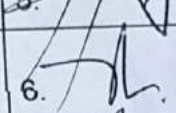
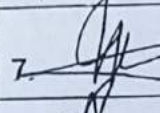
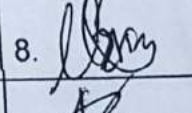
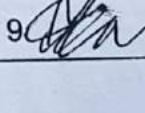

DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : A. Muhammad Nuzul Idris

NIM : 10500113106

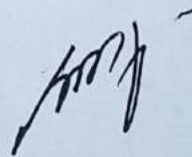
JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Atas Pengedaran Narkotika
(Studi Putusan Nomor: 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Pembimbing	3. 
4.	Ashabul Kahpi, S.Ag, M.Ag	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Hamsir, M.Hum	Penguji	5. 
6.	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Penguji	6. 
7.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	7. 
8.	Nasirah Asri, S.Kom	Pelaksana	8. 
9.	A. Muhammad Nuzul Idris	Mahasiswa	9. 

Samata Gowa, 15 Maret 2018

Ketua Panitia


 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
 NIP : 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



A. Muhammad Nuzul Idris merupakan anak Ketiga dari pasangan H.A. Idris Tumpa., S.H dan Hj. Cendrawati Lahir di Makassar, 17 Februari 1995. Tumbuh dan berkembang di Kota Makassar. Dalam jenjang pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Unggulan Toddopuli tamat pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Makassar tamat pada tahun 2010, penulis meneruskan di Sekolah Menengah Atas Kartika Cahandra Kirana Wirabuana I

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Semasa kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar kampus Uin Alauddin Makassar. Penulis juga aktif di beberapa Organisasi Ekstra maupun Intra kampus antara lain yakni, Intellectual Law Enforcement, Hmi Komisyariat Syariah dan Hukum, Hmj Ilmu Hukum, Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Ukm Taekwondo Uin Alauddin Makassar, Serikat Mahasiswa Penggiat Konsitusi Dan Hukum

Penulis dapat dihubungi melalui:

E-mail : Nuzul17muhammad@gmail.com